

WORKPLAN 2018

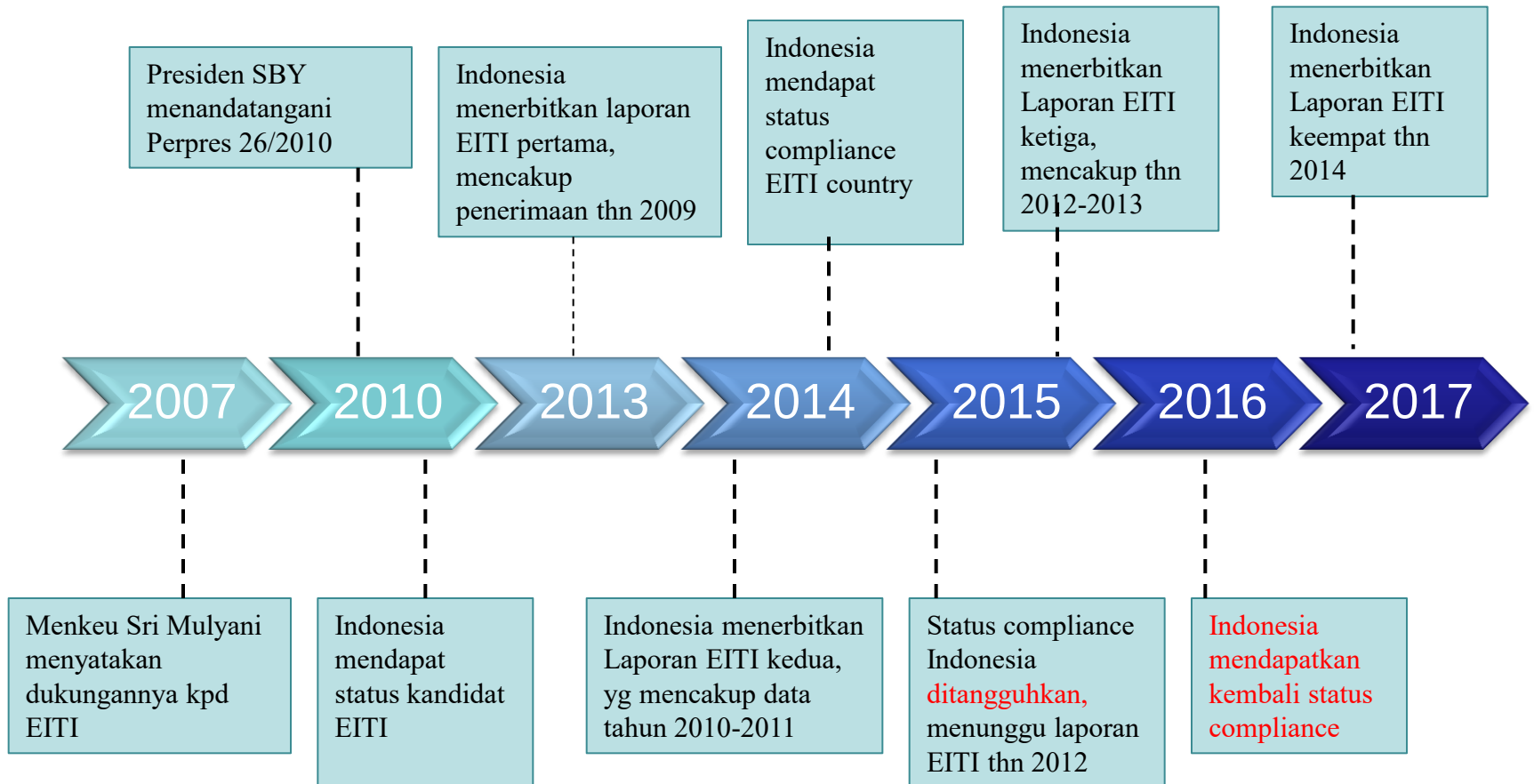
Pendahuluan

- Sesuai dengan Perpres 26/2010, Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
- Dalam perkembangannya, Standard EITI 2016 mewajibkan negara pelaksana EITI untuk juga membuka tata kelola industri ekstraktif, sehingga kegiatan EITI menjadi lebih menyeluruh dengan mengikuti rantai nilai (*value chain*) industri
- Mengingat akan hal tersebut, maka masing-masing negara pelaksana EITI perlu merumuskan kembali tujuan dari pelaksanaan EITI di negaranya

1. Identifikasi Prioritas Nasional untuk industri ekstraktif
2. Mendefinisikan tujuan pelaksanaan EITI
3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan
4. Menyepakati dan mempublikasikan workplan
5. Monitoring dan evaluasi

1. Identifikasi Prioritas Nasional untuk industri ekstraktif
2. Mendefinisikan tujuan pelaksanaan EITI
3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan
4. Menyepakati dan mempublikasikan workplan
5. Monitoring dan evaluasi

Perkembangan EITI Indonesia



- Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- Mendukung kedaulatan energi
- Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi

Tujuan Kegiatan EITI (1)

Secara umum tujuan kegiatan EITI dapat dirumuskan menjadi :

- **Mempromosikan transparansi tata kelola industri ekstraktif** untuk seluruh kegiatan dalam rantai nilai (*value chain*) industri, antara lain meliputi proses pemberian izin, kerangka hukum dan kontrak, informasi produksi dan penjualan (ekspor), pembayaran kepada negara, bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah, partisipasi perusahaan negara, dampak lokal maupun nasional, kewajiban pembayaran CSR, dll
- **Meningkatkan partisipasi masyarakat** dalam mengawasi, memberikan saran masukan dan mengoreksi pengelolaan industri ekstraktif baik terkait kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan

Tujuan Kegiatan EITI (2)

- **Mendorong upaya reformasi** secara berkelanjutan terhadap kebijakan, regulasi, dan praktek-praktek pengelolaan industri ekstraktif, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan
- **Membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara** dari industri ekstraktif dengan mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan industri ekstraktif sehingga EITI bisa menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi di sektor industri ekstraktif
- **Membantu pencegahan korupsi** dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan industri ekstraktif

Identifikasi Permasalahan (1)

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan EITI seperti tersebut diatas, beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi antara lain adalah:

- Permasalahan terkait isu kesadaran dan kepedulian (*awareness*) parapihak, khususnya kalangan pemerintah dan perusahaan, akan pentingnya transparansi tata kelola industri ekstraktif, sehingga berpengaruh kepada tingkat partisipasi dalam pelaksanaan EITI.
- Masih adanya pandangan bahwa tata kelola pemerintahan (*governance*) di beberapa sektor SDA seharusnya bersifat tertutup karena terkait aset negara yang besar dan menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*) dan ketahanan ekonomi (*economic resilience*). Hal ini juga berlaku pada sektor industri ekstraktif yang mengelola kekayaan alam sebagai aset negara dalam jumlah yang sangat besar, yang selama ini tata kelolanya belum sepenuhnya transparan.

-

- Pengembangan database EITI
- Analisis Data dan Informasi
- Penyusunan Laporan EITI
- Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi dan Diskusi Publik
- Mengembangkan Mekanisme Revisi Tata Kelola
- Peningkatan kapasitas SDM

WORKPLAN EITI 2018

[illegible]

Terima Kasih